



# LAMPIRAN

## KOMPENDIUM PRAKTIK BAIK

demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
untuk anak di Indonesia

2021

1	Pembiayaan WASH Inovatif untuk Masyarakat Miskin	Nusa Tenggara Barat	2
2	Memperkuat Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Memanfaatkan Norma Budaya	Nusa Tenggara Timur	5
3	WASH di Sekolah dan Fasilitas Layanan Kesehatan dalam Program Pemulihan Bencana	Sulawesi Tengah	8
4	Twinning Programme: Pembelajaran Horisontal tentang Pengolahan Lumpur Tinja	Sulawesi Selatan	10



## Pembiayaan WASH Inovatif untuk Masyarakat Miskin

*Topik: Akses ke air dan sanitasi, menghapus praktik buang air besar sembarangan, kesetaraan*

*Lokasi: Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram, Kota Bima, Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah)*

### Rangkuman Pendekatan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi program bebas buang air besar sembarangan (BABS) melalui program BASNO beberapa tahun yang lalu. Namun, meski program tersebut dirancang sebagai gerakan yang melibatkan masyarakat luas, hasilnya belum memuaskan. Pada April 2021, hanya 64 persen desa dan satu dari 10 kabupaten yang meraih status Bebas BABS. Faktor utama yang menghambat kemajuan adalah kapasitas keuangan provinsi yang terbatas dan penjangkauan masyarakat miskin. Data Bappeda NTB tahun 2019 menunjukkan bahwa anggaran tahunan yang dialokasikan untuk air bersih dan sanitasi hanya 0,54 persen.

Peluang untuk mempercepat gerakan tersebut muncul pada tahun 2015 ketika majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk mendukung penyediaan akses air dan sanitasi untuk masyarakat miskin. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB untuk mendukung program BASNO.

Pada tahun 2017, Bappeda mulai bekerja sama dengan BAZNAS NTB untuk mengembangkan program bersama yang terdiri atas intervensi peningkatan akses sanitasi yang baik bagi masyarakat miskin dan perbaikan rumah tidak layak huni beserta fasilitas sanitasinya. Agar program tepat sasaran, Bappeda menyusun daftar penerima manfaat desa sementara berdasarkan data peta kemiskinan, termasuk melalui konsultasi dengan dinas kesehatan provinsi. Selama tiga tahun pertama, BAZNAS menanggung semua biaya pelaksanaan, dengan menyumbang Rp3,7 miliar (253.000 dolar AS) pada tahun 2017, Rp4,5 miliar (307.700 dolar AS) pada tahun 2018 dan 2019, serta Rp5,7 miliar (US\$360.000 dolar AS) pada tahun 2020.

BAZNAS kabupaten, bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya, ditugaskan untuk memverifikasi daftar penerima manfaat sementara. Verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten difokuskan pada ketersediaan fasilitas jamban di rumah-rumah, sedangkan BAZNAS mempertimbangkan kriteria yang selaras dengan hukum Islam untuk memastikan kelayakan penerima. Konstruksi jamban dan perbaikan rumah diawasi secara proporsional oleh pemerintah desa, sanitarian, tenaga kesehatan dan militer.

UNICEF memberikan bantuan teknis kepada Bappeda dan kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) termasuk dalam berkoordinasi dengan BAZNAS. UNICEF melakukan advokasi di kabupaten/kota untuk mendorong adopsi pembiayaan inovatif, kesetaraan dan inklusi dalam WASH. UNICEF juga mendukung pengembangan kapasitas Pokja AMPL serta mengadakan monitoring dan evaluasi program pada tahun 2018. Pada awal tahun 2020, UNICEF mendukung penyusunan pedoman teknis replikasi yang disebarluaskan ke 10 kabupaten/kota.



<b>Hasil Penting yang Dicapai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedikitnya 7.776 orang dewasa dan anak-anak di 36 desa memperoleh manfaat dari konstruksi jamban dan akses air bersih yang lebih baik.</li> <li>888 jamban keluarga dibangun dan 654 rumah tidak layak huni direnovasi dan dilengkapi dengan jamban yang layak:             <ul style="list-style-type: none"> <li>2017: 200 rumah, 361 jamban</li> <li>2018: 195 rumah, 277 jamban</li> <li>2019: 250 rumah, 250 jamban</li> </ul> </li> <li>Lokasi program terus meluas selama tiga tahun terakhir. Dimulai di enam desa di enam kabupaten, program tersebut berkembang ke 10 desa di 10 kabupaten pada tahun berikutnya.</li> <li>Bappeda Provinsi NTB mengeluarkan surat edaran pada tahun 2020 yang mendorong pemerintah kabupaten/kota mereplikasi program kerja sama ini.</li> </ul>				
<b>Replikasi/ peningkatan skala program</b>	<p>Replikasi sedang berlangsung di lima lokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kota Sumbawa: Desa Hijrah di Kecamatan Lape meraih status Bebas BABS melalui program yang didanai oleh Unit Pengumpulan Zakat setempat.</li> <li>Lombok Timur: BAZNAS mengalokasikan Rp177 juta (12.100 dolar AS) untuk penyediaan pipa air bersih di Desa Bilok Petung.</li> <li>Kota Mataram: BAZNAS mendanai replikasi di Desa Sayang-Sayang</li> <li>Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa Barat mereplikasi program tersebut berdasarkan hasil pertukaran pengetahuan antarkabupaten yang didukung UNICEF.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="336 1155 1473 1263"> <tr> <td data-bbox="336 1155 491 1263"><b>Biaya</b></td> <td data-bbox="496 1155 1473 1263"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jamban Rp3 juta (US\$ 205)/unit</li> <li>Renovasi rumah Rp35 juta (US\$ 2.400)/rumah</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jamban Rp3 juta (US\$ 205)/unit</li> <li>Renovasi rumah Rp35 juta (US\$ 2.400)/rumah</li> </ul>		
<b>Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jamban Rp3 juta (US\$ 205)/unit</li> <li>Renovasi rumah Rp35 juta (US\$ 2.400)/rumah</li> </ul>				
<b>Replikasi/ peningkatan skala program</b>	<table border="1" data-bbox="336 1270 1473 1749"> <tr> <td data-bbox="336 1270 491 1379"><b>Kete-rampilan</b></td> <td data-bbox="496 1270 1473 1379"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan pembangunan jamban dan rumah yang aman</li> <li>Koordinasi dan pengawasan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1386 491 1749"><b>Pemangku kepen-tingan</b></td> <td data-bbox="496 1386 1473 1749"> <ul style="list-style-type: none"> <li>BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Bappeda provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Kelompok kerja AMPL provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas pekerjaan umum dan perumahan</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Sanitarian</li> <li>Puskesmas</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Kete-rampilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan pembangunan jamban dan rumah yang aman</li> <li>Koordinasi dan pengawasan</li> </ul>	<b>Pemangku kepen-tingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Bappeda provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Kelompok kerja AMPL provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas pekerjaan umum dan perumahan</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Sanitarian</li> <li>Puskesmas</li> </ul>
<b>Kete-rampilan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan pembangunan jamban dan rumah yang aman</li> <li>Koordinasi dan pengawasan</li> </ul>				
<b>Pemangku kepen-tingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Bappeda provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Kelompok kerja AMPL provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>Dinas pekerjaan umum dan perumahan</li> <li>Pemerintah desa</li> <li>Sanitarian</li> <li>Puskesmas</li> </ul>				
<b>Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan BAZNAS sebagai anggota Pokja AMPL memperkuat koordinasi dengan aparat pemerintah.</li> <li>Fatwa dari MUI dan surat edaran dari Gubernur NTB menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan dan replikasi program.</li> <li>UNICEF mendapatkan penghargaan dari Gubernur NTB pada tahun 2019 atas kontribusinya pada program pengurangan kemiskinan melalui dukungan untuk BASNO.</li> </ul>				



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bappeda dan BAZNAS NTB, dengan dukungan dari UNICEF, berbagi praktik baik di sesi pembelajaran advokasi/horizontal di Makassar pada bulan Februari 2019.</li><li>• Pedoman teknis pelaksanaan program di NTB dapat dijadikan sebagai model untuk pedoman serupa di tingkat nasional.</li></ul>
<b>Referensi dan informasi lebih lanjut</b>	<p>Website:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.unicef.org/indonesia/id/stories/sanitasi-aman-untuk-feby">www.unicef.org/indonesia/id/stories/sanitasi-aman-untuk-feby</a></li><li>• <a href="http://www.unicef.org/indonesia/baznas-x-unicef">www.unicef.org/indonesia/baznas-x-unicef</a></li><li>• <a href="http://bappeda.ntbprov.go.id/nusa-tenggara-barat-menuju-buang-air-besar-sembarang-nol-basno-2023/">bappeda.ntbprov.go.id/nusa-tenggara-barat-menuju-buang-air-besar-sembarang-nol-basno-2023/</a></li></ul> <p>Fitur media:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.suarakarya.id/detail/95454/BAZNAS-UNICEF-Berkolaborasi-Bangun-Fasilitas-WASH-Untuk-Anak-Anak-Korban-Gempa-Palu-NTB">www.suarakarya.id/detail/95454/BAZNAS-UNICEF-Berkolaborasi-Bangun-Fasilitas-WASH-Untuk-Anak-Anak-Korban-Gempa-Palu-NTB</a></li><li>• <a href="http://www.pamsimas.org/gubernur-ntb-beri-piagam-kepada-pamsimas/">www.pamsimas.org/gubernur-ntb-beri-piagam-kepada-pamsimas/</a></li><li>• <a href="http://www.nawasis.org/portal/berita/read/rangkul-baznas-ntb-amankan-rp-4-5m-untuk-dukung-basno/51505">www.nawasis.org/portal/berita/read/rangkul-baznas-ntb-amankan-rp-4-5m-untuk-dukung-basno/51505</a></li></ul>
<b>Informasi kontak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rostia La Ode Pado, Staf WASH UNICEF (rlaodepado@unicef.org)</li><li>• Muhammad Zainal, Spesialis WASH UNICEF (mzainal@unicef.org)</li><li>• Taufik, Kelompok Kerja AMPL, Bappeda Nusa Tenggara Barat (hs.taufiq70@gmail.com)</li></ul>



## Memperkuat Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Memanfaatkan Norma Budaya

*Topik: Akses air dan sanitasi; menghapus praktik buang air besar sembarangan*  
*Lokasi: Nusa Tenggara Timur (Sumba Timur dan Sumba Barat Daya)*

### Rangkuman Pendekatan

Menurut data tahun 2017, satu dari tiga rumah tangga di daerah perdesaan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki akses ke jamban. Di daerah perkotaan, angkanya adalah 29,09 persen. Hanya rumah tangga di Kota Kupang dan Kabupaten Alor yang semuanya memiliki akses ke jamban.

UNICEF telah bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk membuat program yang bertujuan untuk menghapus praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan mempromosikan pengelolaan sanitasi yang aman sejak tahun 2013. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mampu memenuhi hak anak dengan mendorong kabupaten untuk meraih status Bebas BABS dan menerapkan pengelolaan sanitasi yang lebih baik.

UNICEF mendukung pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya untuk menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui advokasi, kampanye, pengembangan kapasitas, pendampingan, dan pemberdayaan untuk mempercepat diraihnya status Bebas BABS.

Strategi yang dilakukan juga mencakup advokasi kebijakan dan advokasi sosial budaya untuk mendukung gerakan berbasis masyarakat (Stop Ta'i Wewar/Tai'ko Wewara) yang norma budaya setempat untuk mempromosikan Bebas BABS, termasuk melalui pelarangan dan sanksi sosial. Tingginya rasa hormat dan kepatuhan masyarakat setempat terhadap norma budaya membuat tokoh masyarakat dan agama serta tim STBM desa berhasil dilibatkan, bahkan di daerah terpencil dan kawasan pegunungan di seluruh pulau.

Masyarakat setempat menganalogikan program STBM seperti perang melawan buang air besar sembarangan. Saat perang pecah, pahlawan dibutuhkan kehadirannya. UNICEF dan kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) mengajak tokoh-tokoh berpengaruh untuk memimpin gerakan tersebut. Misalnya, Camat Kahali yang dikenal tokoh progresif menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menggerakkan para pemangku kepentingan: tokoh adat dan masyarakat, tokoh agama, rukun tetangga, dan bahkan perangkat desa yang mewakili TNI dan Polri. Ia memerintahkan kepala desa untuk mendukung program STBM dan mengalokasikan dana untuk membangun jamban, dengan bekerja sama dengan puskesmas.

Pemimpin gereja setempat menggunakan mimbar untuk menggemakan semangat Bebas BABS dan melangkah lebih jauh dengan menerbitkan kumpulan khotbah yang mendukung penghentian praktik BABS dan mempromosikan perubahan perilaku, dengan menggunakan simbol dan narasi yang diambil dari kitab suci. Sanksi adat dan sosial, seperti memasang bendera hitam di depan rumah yang tidak memiliki jamban, dikenakan untuk memberikan efek jera bagi rumah tangga yang tidak patuh dan untuk membangun kesadaran publik. Ada pula sekumpulan perempuan yang turut berkontribusi dengan mengadakan arisan untuk mengumpulkan dana guna membangun toilet di lingkungan rukun tetangga (RT) mereka.



	<p>Pada tahun 2015, pemerintah Kecamatan Kahali memulai gerakan berbasis RT yang dibangun berdasarkan narasi bahwa toilet keluarga harus tersedia demi meningkatkan keselamatan perempuan dan anak-anak. Sebuah tim dibentuk untuk memastikan apakah jamban yang baru digunakan oleh penduduk sekaligus mengkampanyekan program ke desa-desa lain. Kecamatan Kahali berhasil meraih status Bebas BABS pada tahun 2017.</p>							
<p><b>Hasil Penting yang Dicapai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Sumba Timur, jumlah desa berstatus Bebas BABS meningkat dari 27 menjadi 47 desa; satu kecamatan juga meraih status Bebas BABS.</li> <li>• Pokja AMPL di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan Rp70 juta (US\$ 4.800) untuk implementasi program STBM.</li> <li>• Model mitra dikembangkan dengan melibatkan puskesmas dan pemerintah desa, yang masing-masing didukung oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) dan Dana Desa.</li> <li>• Jaringan kelompok masyarakat sipil peduli beserta tokoh agama dan adat dibentuk untuk melanjutkan gerakan STBM.</li> <li>• Keberhasilan program telah diakui secara luas. UNICEF Malaysia mendukung kunjungan pertukaran pengetahuan ke lokasi program.</li> </ul>							
<p><b>Replikasi/ peningkatan skala program</b></p>	<p>Di Sumba Barat Daya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp70 juta (US\$ 4.800) dialokasikan dan upaya rinci untuk meraih status Bebas BABS dimasukkan dalam rencana pembangunan.</li> <li>• Di beberapa desa, replikasi berlangsung menggunakan sumber daya lokal, misalnya di Kecamatan Wewewa Utara.</li> <li>• Jaringan AMPL memfasilitasi upaya berbagi pengetahuan antara Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kupang, dengan mengundang asosiasi pengusaha sanitasi.</li> </ul> <p>Di Sumba Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOK sebesar Rp1,7 miliar (US\$ 116.200) dialokasikan dengan rincian Rp7,5 juta (513 dolar AS)/desa.</li> <li>• Dinas kesehatan puskesmas, dan pemerintah desa membangun hubungan kemitraan untuk meningkatkan kualitas jamban, menambah pasokan air bersih, dan melakukan pemantauan dan evaluasi.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="336 1507 1474 2047"> <tr> <td data-bbox="336 1507 493 1659"> <p><b>Biaya</b></p> </td> <td data-bbox="493 1507 1474 1659"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehabilitasi jamban</li> <li>• Koordinasi dan pengawasan</li> <li>• Gaji staf promosi kesehatan</li> <li>• Pertukaran pengetahuan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1659 493 1798"> <p><b>Kete-rampilan</b></p> </td> <td data-bbox="493 1659 1474 1798"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi jamban</li> <li>• Sanitasi total berbasis masyarakat</li> <li>• Keterlibatan pemangku kepentingan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1798 493 2047"> <p><b>Pemangku kepen-tingan</b></p> </td> <td data-bbox="493 1798 1474 2047"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda provinsi dan kabupaten</li> <li>• Kelompok Kerja AMPL</li> <li>• Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Tokoh masyarakat</li> <li>• Sanitarian</li> </ul> </td> </tr> </table>		<p><b>Biaya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehabilitasi jamban</li> <li>• Koordinasi dan pengawasan</li> <li>• Gaji staf promosi kesehatan</li> <li>• Pertukaran pengetahuan</li> </ul>	<p><b>Kete-rampilan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi jamban</li> <li>• Sanitasi total berbasis masyarakat</li> <li>• Keterlibatan pemangku kepentingan</li> </ul>	<p><b>Pemangku kepen-tingan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda provinsi dan kabupaten</li> <li>• Kelompok Kerja AMPL</li> <li>• Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Tokoh masyarakat</li> <li>• Sanitarian</li> </ul>
<p><b>Biaya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/rehabilitasi jamban</li> <li>• Koordinasi dan pengawasan</li> <li>• Gaji staf promosi kesehatan</li> <li>• Pertukaran pengetahuan</li> </ul>							
<p><b>Kete-rampilan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi jamban</li> <li>• Sanitasi total berbasis masyarakat</li> <li>• Keterlibatan pemangku kepentingan</li> </ul>							
<p><b>Pemangku kepen-tingan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda provinsi dan kabupaten</li> <li>• Kelompok Kerja AMPL</li> <li>• Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten</li> <li>• Pemerintah desa</li> <li>• Tokoh masyarakat</li> <li>• Sanitarian</li> </ul>							



<b>Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komitmen dan kepemimpinan kuat yang terlihat di Kabupaten Sumba Timur dan Kecamatan Kahali menghasilkan pelaksanaan program yang efektif.</li><li>• Pembiayaan program yang menggunakan sumber daya lokal, terutama Dana Desa, adalah kunci untuk mempercepat adanya hasil.</li><li>• Berbagi pembelajaran di berbagai forum kepada pendengar yang lebih luas sekaligus memotivasi wilayah lain untuk berpartisipasi secara aktif dapat mendorong replikasi program.</li><li>• Agar efektif, program tersebut harus didukung sumberdaya manusia yang memadai. Misalnya, Kecamatan Kahali merekrut sanitarian, staf promosi kesehatan, dan staf kesehatan masyarakat untuk membantu program tersebut.</li><li>• Kerja sama yang efektif antara dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, dan pemerintah desa dapat berkontribusi pada capaian program.</li></ul>
<b>Referensi dan informasi lebih lanjut</b>	<p>Laporan pemerintah daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan CLTS <i>Rapid Assessment Protocol</i> (CRAP) Tool Sumba Timur dan Sumba Barat Daya (2020)</li></ul> <p>Fitur media pemerintah daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.bappelitbangda.nttprov.go.id/portal/index.php/item/527-diseminasi-hasil-pelaksanaan-clts">www.bappelitbangda.nttprov.go.id/portal/index.php/item/527-diseminasi-hasil-pelaksanaan-clts</a></li><li>• <a href="http://www.bappelitbangda.nttprov.go.id/portal/index.php/item/500-upaya-sinergisasi-program-ampl-tahun-2020">www.bappelitbangda.nttprov.go.id/portal/index.php/item/500-upaya-sinergisasi-program-ampl-tahun-2020</a></li></ul>
<b>Informasi kontak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rostia La Ode Pado, Staf WASH UNICEF (rlaodepado@unicef.org)</li><li>• Muhammad Zainal, Spesialis WASH UNICEF (mzainal@unicef.org)</li><li>• Tanda Sirait, Kelompok Kerja AMPL, Bappelitbangda Nusa Tenggara Timur (gogorait@gmail.com)</li></ul>



## WASH di Sekolah dan Fasilitas Layanan Kesehatan dalam Program Pemulihan Bencana

Topik: Dukungan WASH daerah

Lokasi: Sulawesi Tengah (Kota Palu, Sigi, Donggala)

### Rangkuman Pendekatan

Merespon bencana gempa bumi disertai likuifaksi dan tsunami yang menimpa Sulawesi Tengah pada tahun 2018, UNICEF bekerja sama dengan CARE Indonesia melakukan intervensi WASH di sekolah dan fasilitas layanan kesehatan yang rusak. Tujuannya adalah memastikan hak anak atas air bersih, sanitasi, dan kebersihan di tiga daerah terdampak tetap terpenuhi

Bekerja sama dengan tiga pemerintah daerah, program ini diadakan di 50 sekolah dan di tiga puskesmas dari bulan Maret 2019 hingga Februari 2020. UNICEF dan mitra lokalnya memanfaatkan relasi yang baik dengan masyarakat terdampak untuk meningkatkan akses fasilitas WASH di sekolah dan fasilitas layanan kesehatan yang menjadi sasaran.

Kegiatan yang dilakukan:

- Pelatihan untuk siswa tentang manajemen kebersihan menstruasi dan promosi kesehatan dan kebersihan, termasuk melalui penunjukan siswa sebagai 'dokter kecil'.
- Meningkatkan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk membantu upaya mengurangi ketidakhadiran siswa karena sakit.
- Rehabilitasi jamban di sekolah dan puskesmas serta kampanye untuk memperbaiki perilaku siswa terkait buang air kecil dan air besar.
- Pembangunan fasilitas cuci tangan memakai sabun yang ramah anak di sekolah untuk meningkatkan kebiasaan cuci tangan siswa.
- Penyusunan standar operasional dan prosedur pemeliharaan fasilitas WASH di puskesmas

### Hasil Penting yang Dicapai

- Kegiatan UKS di 50 sekolah dasar didukung oleh 98 'dokter kecil' terlatih. Komite WASH di 50 sekolah juga dilatih untuk mengawasi pemeliharaan fasilitas WASH di sekolah, praktik cuci tangan pakai sabun dan memfasilitasi keterlibatan semua warga sekolah dalam program.
- Pembangunan jamban baru di sembilan sekolah dan renovasi jamban di 41 sekolah. Dua belas sekolah memperoleh bangunan jamban baru maupun rehabilitasi jamban. Pemantauan pasca kegiatan (*post action monitoring* atau PAM) menunjukkan bahwa 8,2 persen siswa yang sebelumnya buang air besar sembarangan telah menghentikan perilakunya.
- Setelah fasilitas cuci tangan pakai sabun ramah anak dibangun di 27 sekolah, PAM menunjukkan bahwa 97,4 persen anak telah mencuci tangan secara teratur.





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 sekolah dan tiga fasilitas layanan kesehatan telah dilengkapi dengan pedoman standar operasional pemeliharaan fasilitas WASH, yang disetujui oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mencakup topik seperti tempat mencuci tangan, sistem air bersih, dan jamban untuk mencegah penularan penyakit.</li> <li>• Puskesmas mengadakan lokakarya bersama pemangku kepentingan setempat guna menyusun rencana kesiapsiagaan untuk mengatasi risiko bencana.</li> </ul>
<p><b>Replikasi/ peningkatan skala program</b></p>	<p><b>Biaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan untuk Komite WASH di 50 sekolah: Rp39.340.000 (2.690 dolar AS)</li> <li>• Pelatihan dokter kecil di 50 sekolah: Rp128.600.000 (880 dolar AS)/100 siswa.</li> <li>• Rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas WASH di 50 sekolah dan 3 puskesmas: Rp1,6 miliar (109.400 dolar AS)</li> <li>• Penyusunan SOP puskesmas Rp10.580.000 (723 dolar AS)</li> <li>• Pencetakan produk manajemen pengetahuan: Rp12.000.000 (820 dolar AS)</li> </ul>
	<p><b>Kete-rampilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pelatihan</li> <li>• Manajemen proyek</li> <li>• Komunikasi</li> </ul>
	<p><b>Pemangku kepen-tingan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf fasilitas layanan kesehatan</li> <li>• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota</li> <li>• Dinas Kesehatan Provinsi</li> <li>• Kepala Desa/Lurah</li> <li>• Pihak pengelola sekolah dan siswa</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
<p><b>Pembelajaran</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses desain fasilitas cuci tangan pakai sabun dan jamban sekolah harus melibatkan siswa dan pemangku kepentingan di sekolah agar memenuhi kebutuhan mereka dan demi memastikan penggunaan yang optimal. Apabila desain tidak nyaman dan siswa menuntut renovasi, maka dapat berakibat pada membengkaknya biaya dan terkendalanya penggunaan fasilitas.</li> <li>• Keterlibatan optimal dari pemerintah daerah, terutama Kepala Desa/Lurah dan masyarakat di sekitar sekolah diperlukan untuk memastikan semua pihak merasa memiliki program.</li> <li>• Ketersediaan SOP pemeliharaan fasilitas WASH dan terbentuknya Komite WASH diperlukan guna menjamin keberlanjutan infrastruktur WASH di sekolah.</li> <li>• Kegiatan lokakarya perencanaan kesiapsiagaan di fasilitas layanan kesehatan seharusnya tidak hanya melibatkan staf, petugas kesehatan kabupaten dan provinsi, serta akademisi, tetapi juga melibatkan perangkat dan masyarakat setempat karena pentingnya peran mereka dalam penanggulangan bencana.</li> </ul>
<p><b>Referensi dan informasi lebih lanjut</b></p>	<p>WASH di Sekolah dan Fasilitas Layanan Kesehatan dalam Program Palu, Sigi, Donggala (Pasigala), 2020</p>
<p><b>Informasi kontak</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enrico Rahadi Djonoputro, Koordinator Sub-Klaster AMPL (edjonoputro@unicef.org)</li> <li>• Fauzan Adhitia, Pemerhati AMPL dalam Kebencanaan (fadhitia@gmail.com)</li> <li>• Andi Arno, Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi</li> <li>• dr. Rika F. Sakaruddin, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi</li> </ul>



## Twinning Programme: Pembelajaran Horizontal tentang Pengolahan Lumpur Tinja

*Topik: Sanitasi yang dikelola dengan aman*

*Lokasi: Sulawesi Selatan (Kota Palopo, Kota Parepare, Pinrang)*

### Rangkuman Pendekatan

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang mendorong pengelolaan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Di Indonesia, sanitasi *on-site* adalah opsi yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, IPLT perlu dikelola dengan baik dan didukung oleh lembaga kompeten dengan menggunakan standar operasi dan prosedur yang jelas. Namun, dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya tujuh kota/kabupaten yang memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja. Kinerja instalasi tersebut pun rendah karena adanya kesenjangan kapasitas pengelolaan, penganggaran, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Pendekatan pembelajaran horizontal yang digunakan di Twinning Programme merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Twinning Programme mengacu pada upaya pembelajaran horizontal antarsesama pemerintah daerah yang awalnya dikembangkan oleh Asosiasi Pengelola Air Limbah Domestik (FORKALIM) Indonesia untuk mengatasi dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan IPLT. Program ini menggunakan pendekatan mentoring dalam kerangka waktu yang ditentukan dan disepakati mentor dan peserta. Mentor dalam hal ini adalah kota/kabupaten yang memiliki keahlian dan kapasitas untuk berinovasi yang dapat menjadi acuan bagi keberhasilan IPLT. Peserta mentoring dalam hal ini adalah kota atau kabupaten yang berpartisipasi dalam program pengembangan kapasitas di bawah bimbingan mentor guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam mengolah dan mengelola air limbah domestik.

Tujuan program ini adalah untuk mempercepat penyebaran pengetahuan dan pengalaman tentang topik terkait tata kelola dan teknologi di IPLT dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Keterbatasan kapasitas di antara sumber daya manusia adalah masalah yang umum terjadi bagi operator sanitasi di banyak wilayah. Peningkatan kapasitas yang paling efektif adalah melalui pembelajaran horizontal (*peer-to-peer learning*) dengan operator berpengalaman. Karenanya, twinning programme memfasilitasi kabupaten/kota peserta mentoring untuk belajar dari kabupaten/kota mentor melalui program pembelajaran yang intens dan terfokus.

Peran UNICEF adalah memberikan dukungan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh operator sanitasi yang memiliki keahlian dan bersedia untuk membagikan keahlian mereka dengan operator sanitasi di daerah lain yang ingin meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya.

Setelah dilakukan analisis, tiga kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Palopo, Kota Parepare, dan Pinrang) dinilai memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk pengembangan IPLT. Kemudian, kabupaten/kota tersebut dipasangkan dengan kabupaten/kota mentor, yakni Gresik dan Sidoarjo di Jawa Timur karena memiliki kemiripan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Topik khusus disepakati berdasarkan hasil diagnostik. Palopo lebih fokus pada perbaikan kelembagaan, sedangkan Parepare dan Pinrang berfokus pada



	<p>peningkatan operasi dan pemeliharaan (O&amp;M) instalasi pengolahan lumpur tinja yang penting untuk memastikan bahwa lumpur dapat diolah dan dibuang dengan aman ke lingkungan.</p> <p>Tiga atau empat kali kunjungan pembelajaran diselenggarakan untuk masing-masing kabupaten mentor dan peserta mentoring. Kunjungan tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan selama enam hingga delapan bulan. Bantuan dan dukungan diberikan kepada peserta mentoring untuk menjamin perbaikan substansial dalam jangka pendek dan menengah.</p>	
<p><b>Hasil Penting yang Dicapai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hingga September 2020, program ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pengolahan lumpur tinja di Kota Palopo, Kota Parepare, dan Pinrang.</li> <li>• Di Parepare, perbaikan teknis telah diselesaikan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdiri dari penerima lumpur, kolam aerobik/ anaerobik, dan tangki Imhoff. Perbaikan non-teknis juga telah dilakukan, seperti menyusun prosedur standar operasional dan pemeliharaan (O&amp;M). Perbaikan ini diuraikan dalam rencana aksi dan ditindaklanjuti dalam rangkaian konsultasi dengan kabupaten mentor Sidoarjo. Hasil kunci lainnya untuk tindak lanjut jangka menengah adalah reorganisasi kelembagaan yang membutuhkan kesepakatan berbagai pemangku kepentingan dan persetujuan tingkat tinggi oleh kabupaten.</li> <li>• Di Kabupaten Pinrang, perbaikan teknis dan kelembagaan yang signifikan telah dilakukan misalnya, menambahkan atap ke kolam dan memperbaiki prosedur O&amp;M berdasarkan rencana aksi dan konsultasi mereka dengan kabupaten mentor Sidoarjo.</li> <li>• Di Palopo, dengan fokus pada peningkatan kelembagaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibentuk di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan diperkuat dengan surat keputusan (SK) walikota. Hal ini merupakan perubahan besar yang akan memengaruhi kapasitas perencanaan dan penganggaran serta menuntun pada peningkatan tenaga kerja, O&amp;M, dan layanan.</li> </ul>	
<p><b>Replikasi/ peningkatan skala program</b></p>	<p><b>Biaya</b></p>	<p>Diharapkan dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas peserta didik dapat mempersiapkan mereka untuk membimbing kabupaten lain, setidaknya di dalam provinsi. Provinsi dapat berperan sebagai ‘perantara pengetahuan’ untuk kabupaten/ kota dan menyelenggarakan pembelajaran horizontal yang serupa, di samping memungkinkan penghematan biaya untuk replikasi intraprovinci. Oleh karena itu, dukungan di tingkat provinsi sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran dapat dipertanggungjawabkan, dukungan kelembagaan dapat diberikan, serta tindak lanjut dan replikasi di masa mendatang dapat dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program kunjungan ke enam kabupaten (mentor dan peserta didik) di dua provinsi: Rp585 juta (40.000 dolar AS)</li> <li>• Akibat pandemi COVID-19, biaya yang dikeluarkan menjadi 40 persen lebih rendah dari anggaran awal.</li> <li>• Biaya program serupa antarkabupaten dalam satu provinsi akan menjadi lebih hemat.</li> </ul>
	<p><b>Keterampilan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan sanitasi provinsi dan kabupaten</li> <li>• Pengetahuan tentang manajemen, operasi, dan teknologi pengolahan air limbah domestik</li> <li>• Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah</li> <li>• Keterampilan pendampingan</li> </ul>



	<b>Pemangku kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) provinsi</li> <li>• Kelompok Kerja AMPL kabupaten</li> <li>• Sektor swasta, untuk layanan sanitasi</li> <li>• Asosiasi Pengelola Limbah Domestik (FORKALIM)</li> </ul>
<b>Pembelajaran</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pembelajaran yang komprehensif. Melalui pendampingan, ketiga kabupaten/kota peserta mampu mengidentifikasi akar tantangan <i>Fecal Sludge Management</i> (FSM) yang kompleks dan saling terkait. Tantangan ini menyoroti perlunya perbaikan yang signifikan, dan membutuhkan dukungan teknis dan non-teknis yang komprehensif di semua tingkatan (dari tingkat fasilitas hingga pengaturan kelembagaan). Pada akhirnya, ketiga kabupaten/kota peserta harus memasukkan hal-hal di luar fokus awal rencana aksi mereka untuk melakukan perbaikan yang signifikan.</li> <li>• Proses kolaboratif. Tingkat keberhasilan dalam menciptakan perubahan berbeda di tiga kabupaten binaan, menyoroti pentingnya kolaborasi multisektoral seiring banyaknya masalah yang dihadapi harus ditangani dengan melibatkan berbagai dinas di kabupaten atau dukungan dari provinsi.</li> <li>• Dukungan kuat dari para pengambil keputusan. Selain kolaborasi yang lebih besar, dukungan kuat dari pemangku kepentingan utama di level kabupaten/kota (walikota/bupati/DPRD) juga penting seiring beberapa perbaikan mendasar memerlukan pertimbangan penganggaran dalam rencana tahunan pemerintah yang akan datang.</li> <li>• Intervensi pembelajaran silang yang efektif dan sistematis untuk replikasi. COVID-19 menimbulkan tantangan dan peluang terkait dengan opsi pembelajaran horizontal yang lebih terjangkau dan relevan untuk ditiru. Karena interaksi selama pandemi dilakukan secara virtual, Twinning Programme memberikan contoh tentang bagaimana pembelajaran yang efektif masih dapat dilakukan melalui kombinasi proses tatap muka dan jarak jauh. Dengan demikian, pengalaman ini menciptakan praktik baik yang inovatif sehingga program dapat direplikasi di luar situasi pandemi dengan biaya yang terjangkau.</li> </ul>
<b>Referensi dan informasi lebih lanjut</b>		<p>Bermitra Mengelola Lumpur Tinja (Catatan Pembelajaran Twinning Program Pengelolaan Air Limbah Domestik di Sulawesi Selatan), Yayasan BaKTI, 2020</p>
<b>Informasi kontak</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wildan Setiabudi, Staf WASH UNICEF (wsetiabudi@unicef.org)</li> <li>• Maraita Listyasari, Spesialis WASH UNICEF (mlistyasari@unicef.org)</li> <li>• Prasetyo, Direktorat Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pras_tyo@hotmail.com)</li> <li>• Asdar Muhammad, Bappelitbangda Sulawesi Selatan (asdarmuhammad1985@gmail.com)</li> <li>• Hamsah Siring, Program Manager WASH Yayasan Bakti (hsinring@bakti.or.id)</li> </ul>

